

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bahasa Bali merupakan salah satu dari 718 bahasa daerah di Nusantara yang menjadi identitas masyarakat Bali sehingga perlu dilestarikan keberahanannya. Hal tersebut berkenaan dengan peranan bahasa Bali sebagai media komunikasi masyarakat hingga perekam kebudayaan Bali (Suardiana, 2012: 1). Terlebih lagi, bahasa Bali memiliki suatu sistem kebahasaan yaitu menggunakan dua dialek. Sejalan dengan hal tersebut, bahasa Bali memiliki Dialek Bali Aga dan Dialek Bali Dataran dalam komunikasi sehari-hari yang merefleksikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali (Sari, 2016: 13). Berkenaan dengan hal itu, eksistensi bahasa Bali perlu dipertahankan di dinamika masyarakat Bali saat ini.

Tantangan pemertahanan bahasa Bali saat ini semakin nyata seiring dengan pengaruh globalisasi, modernisasi, serta dominasi bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Bali. Sejalan dengan hal itu, fenomena jumlah penutur bahasa Bali, terutama pada generasi muda menimbulkan suatu kekhawatiran terhadap keberlangsungan bahasa Bali (Ariana, 2024: 162). Terlebih lagi, isu global tentang pemertahanan bahasa menempatkan banyak bahasa daerah pada risiko kepunahan, sehingga upaya revitalisasi dan pelestarian bahasa menjadi agenda penting bagi kelangsungan identitas budaya suatu komunitas sehingga menjadi perhatian pemerhati bahasa hingga pemerintah di Bali melalui pelbagai kebijakan pemertahan bahasa Bali.

Implementasi tentang pelbagai kebijakan terhadap pemertahanan bahasa Bali cenderung dipahami menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di Bali. Perencanaan, penyusunan hingga pelaksanaan kebijakan terkait pemertahanan bahasa Bali menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali serta kabupaten/kota. Hal ini teraktualisasi melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 1992 tentang *Bahasa, Aksara dan Sastra Bali*. Sejalan dengan hal itu, pemertahanan terhadap Bahasa Bali juga teraktualisasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 20 Tahun 2013 tentang *Bahasa, Aksara dan Sastra Daerah Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Di samping dua kebijakan tersebut, pemerintah daerah di Bali juga mengaktualisasi sejumlah Perda dan Pergub sebagai suatu bentuk pemertahanan terhadap bahasa Bali melalui ranah pendidikan formal dan informal dalam dimensi kehidupan yang terintegrasi (Wisnu dkk., 2023: 2).

Pemertahanan bahasa Bali melalui Perda Nomor 3 Tahun 1992 diperkuat melalui diterbitkannya Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali* yang menekankan perlindungan di samping pembinaan terhadap keberadaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Sejalan dengan hal tersebut, Pergub Bali Nomor 20 Tahun 2013 diperkuat melalui diterbitkannya Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang *Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali* yang menekankan penggunaan bahasa Bali dalam ruang publik melalui penggunaan aksara Bali pada papan nama kelembagaan serta pelaksanaan Bulan Bahasa Bali setiap tahun. Serangkaian kebijakan tersebut memperjelas kedudukan dan peranan pemerintah daerah di Bali yang signifikan terhadap pemertahanan bahasa Bali (Putra, 2020).

Keberadaan dan keberlanjutan bahasa Bali sebagai salah satu bahasa daerah di Nusantara turut mendapat perhatian dari pemerintah pusat melalui pelbagai kebijakan serta kelembagaan yang terkait dengan aspek kebahasaan di Indonesia. Hal ini terefleksi melalui kedudukan dan peran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) sebagai institusi dalam menjalankan undang-undang kebahasaan Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Lembaga tersebut menaungi Balai Bahasa (BB) yang tersebar di sejumlah wilayah NKRI termasuk di wilayah Provinsi Bali, yaitu Balai Bahasa Provinsi Bali (BBPB). Keberadaan BBPB secara kelembagaan berperan dalam pelindungan dan pemasyarakatan bahasa sastra Indonesia termasuk bahasa daerah di Provinsi Bali. Serangkaian peran BBPB terefleksi melalui pelbagai kebijakan terkait dengan pemertahanan bahasa Bali yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah.

Fungsi BBPB secara kelembagaan pada awalnya dibentuk pada tahun 1947 dengan nama *Taal Amtenaar Voor Bali* yang berkedudukan di Singaraja serta bertugas untuk melakukan penelitian terkait benda- kuno dan prasasti di Bali. Seiring dengan penambahan fungsi kerja, terjadi beberapa perubahan nama hingga menjadi BBPB melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/O/1999 pada 28 Januari 1999 dan selanjutnya menjalankan fungsi strategis dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa serta sastra. Hal tersebut juga terefleksi pada keberadaan bahasa Bali, melalui pelbagai kegiatan penelitian, pendokumentasian, penyusunan bahan kebahasaan, pembinaan tenaga pendidik, serta pelaksanaan program-program revitalisasi bahasa daerah. Keberadaan BBPB juga diarahkan pada penguatan bahasa Bali dalam pendidikan.

Kebijakan terkait pemertahanan bahasa Bali oleh BBPB teraktualisasi dalam pelbagai program yang mendukung misi kelembagaan serta sinergitas dengan pemerintah daerah, salah satunya mewujudkan kelestarian bahasa daerah. Hal tersebut berlandaskan atas prinsip bahasa daerah menjadi kekayaan budaya bangsa yang mendukung bahasa nasional (Indonesia) serta harus dijaga keberlanjutannya (Intishar dkk., 2023: 292). Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan BBPB yang terkait dengan pemertahanan bahasa Bali seperti penyediaan layanan perpustakaan yang menyediakan literatur berbahasa Bali, pelaksanaan pelatihan dan publikasi buku cerita anak berbahasa Bali, hingga pembuatan aplikasi PARASALI (*Pamlajahan Aksara, Basa, lan Sastra Bali*). Kebijakan tersebut memperjelas peranan BBPB dalam pemertahanan bahasa Bali.

Kebijakan pemertahanan bahasa Bali juga terefleksi melalui fungsi BBPB berkenaan dengan kegiatan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Hal tersebut didasarkan atas vitalitas bahasa Bali yang tergolong dalam kategori rentan berdasarkan hasil kajian vitalitas bahasa daerah tahun 2011-2021 yang selanjutnya diaktualisasikan dalam kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD). Kegiatan RBD merupakan upaya untuk melestarikan dan menghidupkan kembali kondisi bahasa daerah yang rentan hingga terancam punah (Nasrullah dkk., 2024:7). Hal tersebut berlandaskan atas kebijakan terkait pelestarian bahasa daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah* (Sudarmadi & Zahra, 2023), baik secara formal maupun informal.



Program RBD merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan vitalitas bahasa daerah melalui upaya yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam Program Merdeka Belajar Episode ke-17. Program ini dirancang tidak hanya untuk melindungi bahasa daerah dari ancaman kepunahan, tetapi juga untuk menghidupkan kembali fungsi bahasa daerah agar tetap digunakan secara aktif dalam kehidupan masyarakat. RBD dilaksanakan dengan melibatkan pelbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga kebahasaan, pemerintah daerah, institusi pendidikan, pendidik, dan komunitas penutur, sehingga dapat dilakukan secara kolaboratif. Berkenaan dengan pendekatan tersebut, implementasi RBD diarahkan pada penguatan sikap positif terhadap bahasa daerah, peningkatan kompetensi, serta perluasan ranah penggunaan bahasa daerah.

Pelaksanaan RBD dalam ranah formal teraktualisasi dalam kebijakan pendidikan yang terintegrasi dalam pembelajaran bahasa daerah (muatan lokal). Berkenaan dengan hal tersebut, RBD juga terintegrasi dalam pembelajaran bahasa Bali sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal wajib di wilayah Bali. Pelaksanaan kegiatan RBD melibatkan para guru dan siswa sebagai aktor utama. Sejalan dengan hal tersebut, program tersebut mencakup pelatihan guru utama, pengimbasan ke sekolah, serta penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) sebagai bentuk refleksi hasil belajar para siswa (Yulianeta & Sutisna, 2022: 50-52). FTBI merupakan puncak apresiasi terhadap program RBD dalam strategi pelestarian yang terintegrasi dan terproyeksi dalam pemertahanan bahasa Bali di ranah pendidikan, terutama di wilayah kabupaten/kota di Bali yang mengalami degradasi penggunaan bahasa Bali.

Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan di wilayah Provinsi Bali. Sebagai pusat pemerintahan, Kota Denpasar juga menjadi barometer perkembangan perekonomian, pariwisata, hingga pendidikan di Bali (Runa dkk., 2011: 2). Berkenaan dengan bidang pendidikan, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) secara aktif mengembangkan pelbagai program strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Denpasar. Implementasi pendidikan di Kota Denpasar mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang teraktualisasi dalam mata pelajaran Bahasa Bali. Sejalan dengan itu, Kota Denpasar melalui Disdikpora melegitimasi kebijakan terkait pemberdayaan para guru Bahasa Bali pada jenjang pendidikan dasar, baik di tingkat SD maupun SMP sebagai suatu refleksi kontribusi dalam pendidikan (Wisnu dkk., 2022: 140).

Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar merefleksikan komitmen dan peranan pemerintah dalam pemertahanan bahasa Bali melalui pembelajaran Bahasa Bali. Hal tersebut menjadi suatu ruang dan peluang yang strategis pelaksanaan RBD seiring dengan degradasi Bahasa Bali di Kota Denpasar. Sejalan dengan hal itu, Kota Denpasar dipandang sebagai wilayah prioritas dalam pelaksanaan RBD terkait dengan degradasi penutur Bahasa Bali yang tergerus globalisasi dan urbanisasi. Terlebih lagi, dinamika teknologi telah mengubah gaya masyarakat yang menuntut segala sesuatu dilakukan secara cepat, termasuk dalam penggunaan bahasa oleh terutama pada kalangan remaja di Kota Denpasar (Arisussila, 2021: 13). Selanjutnya, RBD diarahkan menjadi pendekatan yang kontekstual terhadap pemertahanan Bahasa Bali jenjang pendidikan dasar, salah satunya tingkat SMP di wilayah Pemerintahan Kota Denpasar yang menjadi fokus dalam kajian ini.

Pemaknaan RBD suatu penguatan terhadap pemertahanan bahasa Bali di Kota Denpasar teraktualisasi kebermanfaatannya melalui peningkatan partisipasi siswa dalam pelbagai kegiatan berbahasa Bali. Berkenaan dengan hal tersebut, RBD berperan dalam meningkatkan jumlah penutur Bahasa Bali berusia remaja. Sejalan dengan itu, upaya tersebut sekaligus mempertegas eksistensi Bahasa Bali di kalangan generasi muda sebagai penutur bahasa Bali aktif. Terlebih lagi, implementasi program RBD dikemas melalui pelbagai kegiatan kreatif seperti lomba berpidato bahasa Bali, menulis aksara Bali, menulis dan membaca cerita pendek (cerpen) serta puisi berbahasa Bali, *macepat*, *masatua*, serta *bebanyolan* yang mampu membangkitkan semangat kebahasaan serta identitas budaya lokal, khususnya pemertahanan bahasa melalui pembelajaran bahasa Bali di Denpasar.

Konstruktivitas penelitian ini berorientasi pada suatu kebijakan terkait pemertahanan bahasa Bali melalui program RBD jenjang SMP di Kota Denpasar. Hal tersebut berkenaan dengan integrasi kebijakan dengan implementasi RBD oleh BBPB, khususnya dalam penguatan pembelajaran bahasa Bali jenjang SMP di Kota Denpasar yang belum dikaji secara mendalam. Berkenaan dengan hal tersebut, kajian ini penting dilakukan terkait dengan refleksi terhadap kontribusi dan sinergi antara kebijakan pendidikan daerah dan pusat tentang pelaksanaan RBD di sekolah. Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi strategi efektif terkait keberlanjutan dan keberlanjutan penutur bahasa Bali melalui program RBD jenjang SMP serta penguatan pembelajaran bahasa Bali serta mampu memberikan landasan akademis sekaligus rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan dan pendidik.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Deskripsi pada latar belakang di atas merefleksikan keterkaitan kebijakan RBD terhadap pemertahanan bahasa Bali terkait penguatan pembelajaran bahasa Bali jenjang SMP di Kota Denpasar. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini teridentifikasi sejumlah permasalahan sebagai berikut.

1. Terjadinya suatu degradasi penutur bahasa Bali pada masyarakat Bali terutama di kalangan generasi muda, khususnya di Kota Denpasar. Fenomena tersebut merupakan suatu refleksi dari implikasi dinamika globalisasi, urbanisasi, serta teknologi yang mengubah gaya hidup hingga penggunaan bahasa masyarakat Bali di Kota Denpasar.
2. Implementasi pembelajaran bahasa Bali di sekolah yang cenderung belum optimal serta membutuhkan strategi pembelajaran bersifat kontekstual. Fenomena tersebut merupakan refleksi terhadap diperlukan suatu penguatan terhadap vitalitas bahasa Bali yang terintegrasi dalam kebijakan pendidikan terutama implementasinya dalam suatu pembelajaran bahasa Bali.
3. Tantangan sinergisasi kebijakan daerah dan pusat dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa Bali di lingkungan pendidikan formal yang belum optimal. Hal tersebut memerlukan identifikasi strategi efektif dalam pelestarian bahasa Bali yang berkelanjutan melalui pembelajaran.
4. Keterbatasan kajian yang mendalam mengenai implementasi RBD, khususnya terhadap suatu pemertahanan bahasa Bali di ranah pendidikan. Hal tersebut berkenaan dengan kajian sebelumnya yang cenderung menyoroiti pelaksanaan dan tantangan RBD secara umum.

### 1.3 Fokus Masalah

Penetapan fokus penelitian merupakan pembatasan topik yang akan dicapai pada suatu kajian penelitian (Moleong, 2022: 94). Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini terfokus pada suatu upaya mengatasi degradasi penutur bahasa Bali. Sejalan dengan itu, kajian ini juga terfokus pada pemertahanan bahasa Bali yang terintegrasi kebijakan kegiatan RBD pada tingkat SMP di Kota Denpasar. Berdasarkan uraian tersebut, difokuskan empat permasalahan yang terkait dengan deskripsi identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Implementasi RBD oleh BBPB jenjang SMP dalam pemertahanan bahasa Bali. Hal tersebut berkenaan dengan kajian pelaksanaan RBD secara menyeluruh dalam upaya menjawab tantangan terkait degradasi penutur bahasa Bali di kalangan remaja sebagai implikasi dari dinamika globalisasi dan urbanisasi, khususnya yang terjadi Kota Denpasar.
2. Disrupsi pelaksanaan RBD oleh BBPB jenjang SMP dalam pemertahanan bahasa Bali di Kota Denpasar yang berkenaan dengan kendala yang muncul hingga solusi yang terimplementasi dalam program RBD.
3. Evaluasi pelaksanaan RBD oleh BBPB jenjang SMP di Kota Denpasar yang berkenaan dengan efektivitas integrasi kebijakan RBD dalam kurikulum sekolah sehingga mempengaruhi peningkatan partisipasi sebagai upaya mempertahankan keberlanjutan bahasa Bali.
4. Proyeksi pelaksanaan RBD oleh BBPB tingkat SMP dalam menghadapi pelbagai tantangan dinamika sosial budaya dan kemajuan teknologi informasi. Hal tersebut berkenaan dengan kebijakan terkait pemertahanan bahasa Bali.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan penelitian ini secara umum diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan program RBD yang diselenggarakan oleh BBPB serta diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Bali di tingkat SMP di Kota Denpasar. Berkenaan hal itu, implementasi program RBD ditujukan sebagai langkah strategis mengatasi penurunan jumlah penutur bahasa Bali, khususnya pada pelajar remaja di Kota Denpasar yang selanjutnya terimplementasi melalui kebijakan pelaksanaan program RBD dalam meningkatkan partisipasi berbahasa Bali oleh siswa SMP.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengkaji suatu penegasan dari fokus permasalahan yang telah dideskripsikan sebelumnya. Deskripsi tersebut sejalan dengan upaya pemertahanan bahasa Bali melalui program RBD pada jenjang SMP di Kota Denpasar. Berkenaan dengan hal itu, maka tujuan khusus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan proses implementasi RBD oleh BBPB dalam upaya pemertahanan bahasa Bali jenjang SMP di Kota Denpasar.
2. Mendeskripsikan disrupsi pelaksanaan RBD oleh BBPB dalam upaya pemertahanan bahasa Bali jenjang SMP di Kota Denpasar.
3. Mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi RBD oleh BBPB dalam upaya pemertahanan bahasa Bali jenjang SMP di Kota Denpasar.
4. Mendeskripsikan proyeksi keberlanjutan kebijakan RBD dalam upaya pemertahanan bahasa Bali jenjang SMP di Kota Denpasar.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoretis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dengan mengembangkan khazanah teori, konsep, serta metode penelitian dalam perspektif kajian kebijakan pendidikan bahasa, khususnya yang berkenaan dengan kebijakan penguatan pembelajaran bahasa Bali di SMP di Kota Denpasar. Hal ini terfokus pada konteks pemertahanan bahasa daerah melalui program-program revitalisasi di satuan jenjang pendidikan dasar. Berkenaan dengan hal itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan konsep dan pendekatan revitalisasi bahasa dalam kebijakan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas akademik serta penguatan identitas budaya dan nilai-nilai lokal sehingga dapat mengembangkan model kebijakan pendidikan yang adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan dalam merespons vitalitas bahasa daerah Bali di era globalisasi.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat secara praktis terhadap suatu pengembangan hingga pemberdayaan lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan pusat maupun daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan terkait dengan vitalitas bahasa Bali di kalangan penutur remaja di Kota Denpasar melalui penguatan pembelajaran bahasa Bali di SMP. Sejalan dengan itu, dimensi kebermanfaatan penelitian secara praktis tersebut dapat dicermati sebagai berikut.



1. Bagi Pemerintah Kota Denpasar dan Balai Bahasa Provinsi Bali, hasil penelitian ini dapat menjadi suatu refleksi perumusan kebijakan dan strategi pemertahanan dan pelestarian bahasa Bali. Berkenaan dengan hal itu, kebijakan yang dirumuskan diharapkan terintegrasi di satuan pendidikan, khususnya melalui Program RBD dan pembelajaran bahasa Bali di jenjang SMP.
2. Bagi Guru Bahasa Bali di Kota Denpasar, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai implementasi kebijakan RBD serta mendorong peningkatan kapasitas pedagogis dalam mengajarkan bahasa Bali secara kontekstual, kreatif, dan relevan dengan dinamika pendidikan.
3. Bagi siswa SMP di Kota Denpasar, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk penguatan program sekolah berbasis budaya lokal melalui kegiatan organisasi di sekolah, salah satunya melalui OSIS. Selanjutnya, penelitian ini juga dapat menjadi suatu refleksi terhadap penggunaan bahasa Bali, baik secara formal maupun informal sehingga meningkatkan vitalitas bahasa Bali di kalangan penutur remaja.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan kajian pemertahanan bahasa daerah dengan konteks sosial, budaya, kebijakan, dan demografis yang berbeda. Sejalan dengan itu, penelitian memberikan peluang untuk melakukan studi lanjutan pada jenjang pendidikan yang berbeda, seperti pada tingkat SD atau SMA/SMK. Hal tersebut merefleksikan kajian yang lebih komprehensif terkait efektivitas dan tantangan pelaksanaan RBD di pelbagai tingkatan.